

## **Pengaruh Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara**

### *The Influence of Structural Transformation and Economic Growth on Income Inequality in Southeast Sulawesi*

**Burhan Asril Jabani<sup>1\*</sup>, Bambang Juanda<sup>2</sup>, & Sri Mulatsih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Jalan Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; <sup>2</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Jalan Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; \*Penulis korespondensi. *e-mail*: burhan.a.jabani@gmail.com  
(Diterima: 26 Februari 2024; Disetujui: 27 Agustus 2024)

#### **ABSTRACT**

*Economic development basically focuses its attention on the process of changing the underdeveloped economic structure so as to enable the emergence of new industries to replace the agricultural sector as the driving force of economic growth. The industrial sector has the largest contribution to the formation of the Gross Regional Domestic Product in Southeast Sulawesi Province. However, when considering employment absorption by sector, the concentration of labor absorption remains focused on the agriculture and services sectors. The industrial sector has the smallest share in terms of employment absorption among sectors in Southeast Sulawesi Province. The aim of this research is to analyze the influence of structural transformation and economic growth on income inequality in Southeast Sulawesi Province. The method used is panel data regression analysis. Research findings show that the transformation of the industrial sector, the transformation of the industrial sector without mining, and economic growth have a negative impact on income inequality. Meanwhile, the service sector transformation variable and economic growth without the mining subsector have a positive impact on increasing income inequality in Southeast Sulawesi Province.*

*Keywords: economic growth, income inequality, structural transformation*

#### **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya memusatkan perhatiannya pada proses perubahan struktur perekonomian suatu wilayah yang belum berkembang sehingga dimungkinkan munculnya industri-industri baru untuk menggantikan sektor pertanian sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor industri menjadi sektor paling besar kontribusinya dalam pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun jika dilihat dari serapan tenaga kerja per sektor, konsentrasi penyerapan tenaga masih terfokus pada sektor pertanian dan jasa, sektor industri menjadi paling kecil dominasinya dalam hal serapan tenaga kerja per sektor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Temuan penelitian menunjukkan transformasi sektor industri, transformasi sektor industri tanpa tambang, dan pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap perbaikan ketimpangan pendapatan. Sedangkan

variabel transformasi sektor jasa dan pertumbuhan ekonomi tanpa subsektor pertambangan berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata kunci: ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah suatu bentuk perubahan dalam masyarakat yang terencana dan terstruktur yang disebabkan oleh berbagai kebijakan dengan tujuan bukan semata menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Masalah ketimpangan seringkali timbul selama proses pembangunan. Ketimpangan tidak hanya dirasakan oleh wilayah berkembang, wilayah maju sekalipun tidak terbebas dari masalah besar ketimpangan. Perbedaannya terletak dari seberapa besar proporsi ketimpangan yang terjadi di masyarakat dan betapa sulit mengatasinya yang dipengaruhi oleh faktor regional (jumlah penduduk, luas wilayah, struktur ekonomi serta sumber daya alam) (Arsyad, 2016). Hingga akhir abad ke 19, fokus utama pembangunan adalah pada upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui bahwa suatu kesuksesan program pembangunan di suatu negara atau wilayah berkembang, sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya pertumbuhan output dan pendapatan nasional yang terjadi. Demikian juga baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah di bidang ekonomi sering diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output yang diperoleh. Namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang relatif terus meningkat, dalam banyak kasus di negara berkembang tidak otomatis meniadakan ketimpangan dalam pembangunan.

Indikator awal adanya ketimpangan pendapatan dapat terlihat dari adanya golongan miskin yang makin miskin dan golongan kaya yang makin kaya dalam masyarakat. Fenomena ketimpangan seringkali menjadi permasalahan jika tidak dieliminir secara hati-hati. Ketimpangan yang relatif tinggi akan menimbulkan masalah yang cukup kompleks dalam masyarakat seperti masalah sosial, ekonomi, politik, kependudukan dan

lingkungan. Dalam konteks yang lebih besar, ketimpangan menghambat proses dan hasil pembangunan yang diinginkan suatu wilayah, seperti meningkatkan angka kriminalitas dan berpotensi menimbulkan perpecahan antar golongan masyarakat (Mopangga, 2010; Sunarto, 2004; Coudouel *et al.*, 2006).

Sulawesi Tenggara sebagai salah satu Provinsi yang ada di Indonesia juga menghadapi masalah ketimpangan. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara masih relatif tinggi. Tingkat ketimpangan tersebut cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2021, distribusi pengeluaran di Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh pengeluaran masyarakat golongan kaya (20% penduduk) yaitu sebesar 46%, kemudian penduduk golongan menengah (40% penduduk) sebesar 37%, sementara masyarakat golongan miskin (40% penduduk) hanya sebesar 17%.

Berdasarkan ukuran indeks gini, tingkat ketimpangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015 sebesar 0.381, lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan nasional yaitu 0.402. Pada periode 2017 hingga 2021 tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berada di atas ketimpangan nasional. Bahkan di tahun 2017 Provinsi Sulawesi Tenggara masuk ke dalam tiga besar provinsi dengan indeks gini tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021 indeks gini Provinsi Sulawesi Tenggara naik menjadi 0.394 sementara secara nasional terjadi penurunan nilai menjadi 0.381.

Berbagai investigasi empiris telah menunjukkan adanya hubungan antara ketimpangan dan risiko konflik. Menurut World Bank (2016) peluang terjadinya konflik 1.6 kali lebih besar di wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi di Indonesia dibandingkan dengan wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah.

Pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dibarengi dengan transformasi struktural ekonomi yang dicirikan dengan besarnya kontribusi sektor modern (industri dan jasa) dalam pembentukan PDRB. Rata-rata kontribusi sektor industri mulai tahun 2017 hingga 2022 adalah sebesar 40% dari total PDRB. Namun di sisi yang berbeda, dilihat dari komposisi serapan tenaga kerja per sektor menunjukkan bahwa konsentrasi penyerapan tenaga kerja masih terpusat di sektor pertanian dan jasa. Rata-rata serapan tenaga kerja sektor industri hanya sebesar 17%.

Fenomena tidak berkembangnya sektor industri dari sisi penyerapan tenaga kerja memberikan sinyal bahwa pergeseran struktur ekonomi ke sektor non pertanian tidak dibarengi oleh pergeseran dari sisinya penyerapan tenaga kerja. Pola pergeseran pada struktur ekonomi berbeda dengan pola pergeseran pada struktur tenaga kerjanya. *Unbalanced transformation* yang terjadi dari sisi penyerapan tenaga kerja dicirikan dari kelemahan sektor industri dalam menarik *surplus* tenaga kerja di sektor pertanian yang menyebabkan sektor pertanian memikul beban tenaga kerja melampaui kemampuan optimalnya, sebagai akibatnya produktivitas sektor pertanian sangat rendah. Kondisi tersebut jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan naiknya tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

Secara teoritis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan perubahan struktur ekonomi. Menurut Jhingan (2014) perubahan struktur ekonomi adalah adanya suatu peralihan dari masyarakat pertanian (tradisional) beralih ke masyarakat yang lebih modern (industri dan jasa). Ketika sektor-sektor yang lebih maju seperti industri dan jasa berkembang, cenderung menyebabkan bertambahnya kesempatan kerja, peningkatan produktivitas buruh, persediaan modal, serta semakin tingginya perbaikan dan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan dalam struktur perekonomian ke arah sektor modern diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut Andersson & Chaverra (2016)

meningkatkan kontribusi sektor pertanian atau mengurangi penggunaan tenaga kerja yang ada di sektor pertanian menuju ke sektor industri dan jasa merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Sejalan dengan hal itu, penjelasan yang sama juga diberikan oleh Romli *et al.* (2016); Susanto (2013); Gonzalez & Resosudarmo (2018), bahwa kontribusi sektor pertanian berkorelasi terbalik dengan ketimpangan pendapatan, artinya bahwa transformasi struktur ekonomi sebagai akibat dari meningkatnya output sektor modern (industri dan jasa) mampu memberikan dampak yang signifikan dalam memperbaiki ketimpangan pendapatan melalui serapan tenaga kerja dengan produktivitas marginal nol yang ada di sektor tradisional perdesaan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel serupa di antaranya, yaitu Ardiansyah (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi sektor industri dan jasa dalam pembentukan PDB Indonesia sebagai bagian dari transformasi struktur ekonomi belum diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata. Ini ditunjukkan oleh hubungan yang positif antara industri dan jasa terhadap ketimpangan pendapatan. Dartanto *et al.* (2017) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa sebelum sektor industri matang. Transformasi tersebut signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Romli *et al.* (2016) menunjukkan bahwa sektor industri dan jasa secara jelas berpengaruh positif dan signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan di Madura. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Pulau Madura.

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana pengaruh transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## METODOLOGI

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data PDRB sektoral, tingkat ketimpangan (indeks gini) dan pertumbuhan ekonomi serta data pendukung lainnya.

### Analisis Regresi Data Panel

Salah satu jenis data yang sering digunakan dalam analisis model regresi adalah data panel. Panel data atau sering juga di sebut sebagai *pooled data* (*pooling* dari pengamatan data *times series* dan *cross-section*) (Juanda, 2009); (Juanda & Junaidi, 2012). Jika setiap data dalam pengamatan unit *cross section* memiliki jumlah *time series* yang sama disebut sebagai *balanced panel* (total jumlah observasi = N x T). Sebaliknya jika jumlah observasi berbeda untuk setiap unit *cross section* maka disebut sebagai *unbalanced panel*.

Menjawab tujuan penelitian mengenai pengaruh struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, arah transformasi struktural yang biasa dianalisis sebagai penentu ketimpangan adalah pertanian-industri dan pertanian-jasa, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dastidar (2012) bahwa Perubahan pola dan struktur ekonomi dapat terjadi antara sektor pertanian berpindah ke arah sektor industri atau dari sektor pertanian langsung ke arah sektor jasa. Transformasi pada umumnya menggunakan pendekatan nilai tambah. Model ini juga menambahkan variabel pendapatan perkapita dan variabel tenaga kerja sebagai variabel kontrol. Model regresi yang dibuat dalam penelitian ini berdasarkan teori dan hasil modifikasi adopsi model yang digunakan oleh Dastidar (2012) dan Kuntoro (2019). Modifikasi pemodelan dilakukan dengan menambahkan variabel transformasi ke arah sektor industri tanpa sub sektor pertambangan (*tr\_ind\_tt*) dan variabel pertumbuhan ekonomi tanpa sub sektor

pertambangan (*Pe\_tt*) sehingga dapat dengan jelas terlihat bagaimana kemampuan variabel secara umum dan tanpa adanya sub sektor pertambangan terhadap perubahan nilai ketimpangan pendapatan.

$$Gini_{it} = \beta_0 + \beta_1 tr\_ind_{it} + \beta_2 tr\_jasa_{it} + \beta_3 tr\_ind\_tt_{it} + \beta_4 Pe_{it} + \beta_5 pe\_tt_{it} + \beta_6 LnPp_{it} + \beta_7 LnTk_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

<i>Gini</i>	= Ketimpangan (gini ratio)
<i>tr_ind</i>	= Transformasi struktural dari sektor pertanian ke arah sektor industri (ratio)
<i>tr_jasa</i>	= Transformasi struktural dari sektor pertanian ke arah sektor jasa (ratio)
<i>Pe</i>	= Pertumbuhan ekonomi (persen)
<i>tr_ind_tt</i>	= Transformasi struktural dari sektor pertanian ke arah sektor industri tanpa sektor tambang (ratio)
<i>Pe_tt</i>	= Pertumbuhan ekonomi tanpa sektor tambang (persen)
<i>Pp</i>	= Pendapatan perkapita (juta)
<i>TK</i>	= Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)
<i>I</i>	= 1,2,..n (Data Cross-section Kabupaten/Kota)
<i>T</i>	= 1,2,..T (Data rime series tahun 2017 – 2022)
$\varepsilon$	= Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

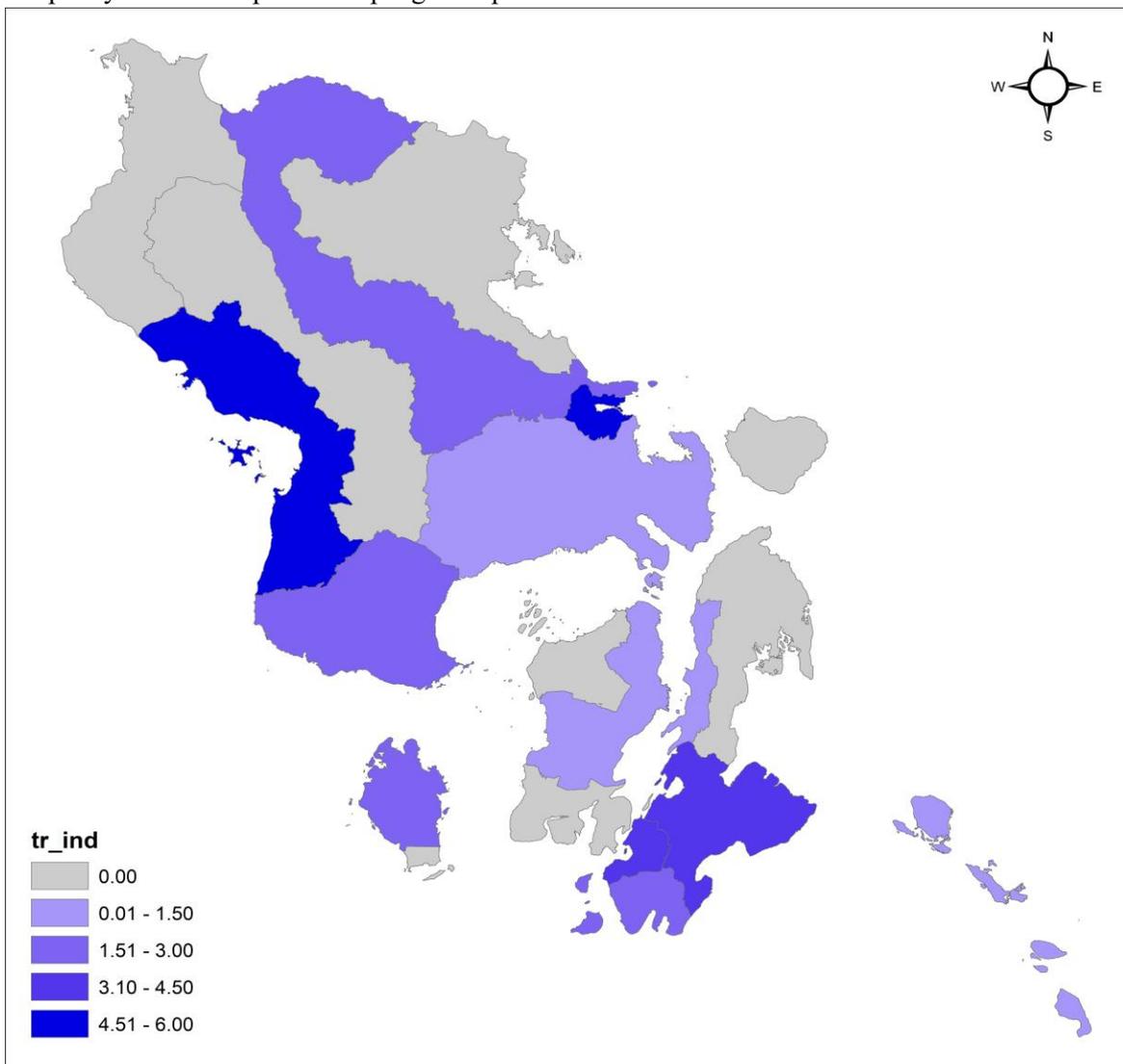
### Pengaruh Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pergeseran struktur perekonomian pada dasarnya merupakan sebuah fenomena dalam suatu perekonomian dimana terjadi sebagai imbas dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pendekatan yang sering digunakan untuk mendeteksi terjadinya pergeseran dalam struktur perekonomian adalah dengan melihat kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam membentuk nilai Produk Domestik Regional Bruto. Ketika

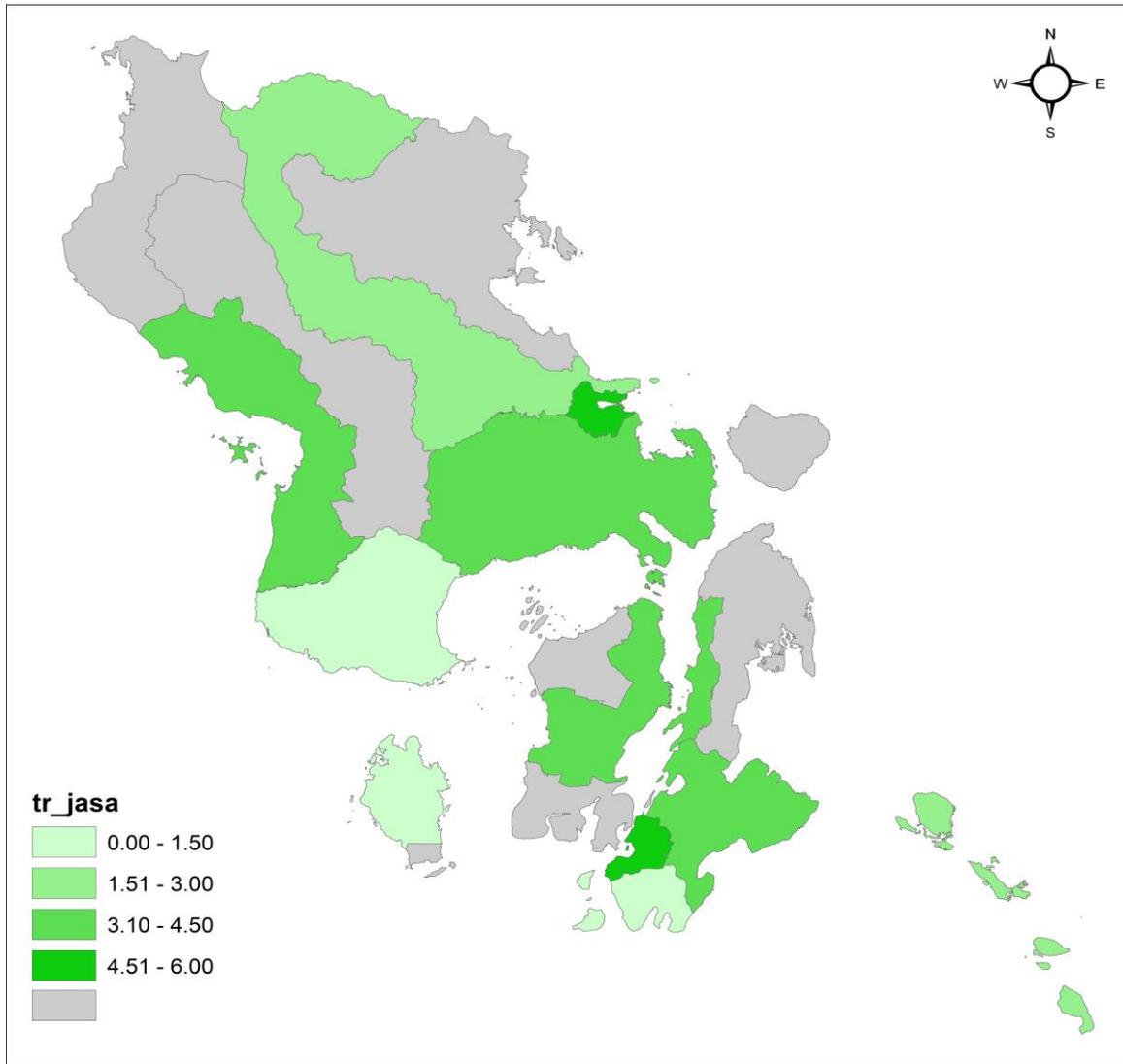
kontribusi output sektor pertanian menurun dan diikuti oleh meningkatnya kontribusi output sektor industri dan jasa, maka transformasi dianggap telah terjadi. Fei & Ranis (1964) menjelaskan bahwa pada negara berkembang, umumnya arah transformasi struktur ekonomi diawali dari perekonomian yang bersifat subsisten yang mengandalkan sektor pertanian beralih menuju ke sektor perekonomian industri. Ketika sumber daya tumbuh, terutama terjadi dari sisi tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian yang kurang produktif ke sektor manufaktur dan jasa yang lebih produktif, perekonomian akan tumbuh dan pendapatan masyarakat akan meningkat (McMillan & Rodrik, 2011); (Rodrik, 2013). Namun, dampaknya terhadap ketimpangan pada

dasarnya tergantung pada sejauh mana partisipasi dan manfaat dari pertumbuhan ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Arah transformasi struktur perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tergambar pada pergeseran sektor di tingkat Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa terdapat sepuluh wilayah administrasi yang telah bergeser dari sektor pertanian menuju ke arah sektor modern (industri dan jasa). Sepuluh dari tujuh belas wilayah ini terpilih menjadi wilayah yang digunakan dalam melihat hubungan transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa wilayah tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Rata-rata transformasi struktur ekonomi pertanian-industri tahun 2017 hingga 2022



Gambar 2. Rata-rata transformasi struktur ekonomi pertanian-jasa tahun 2017-2022

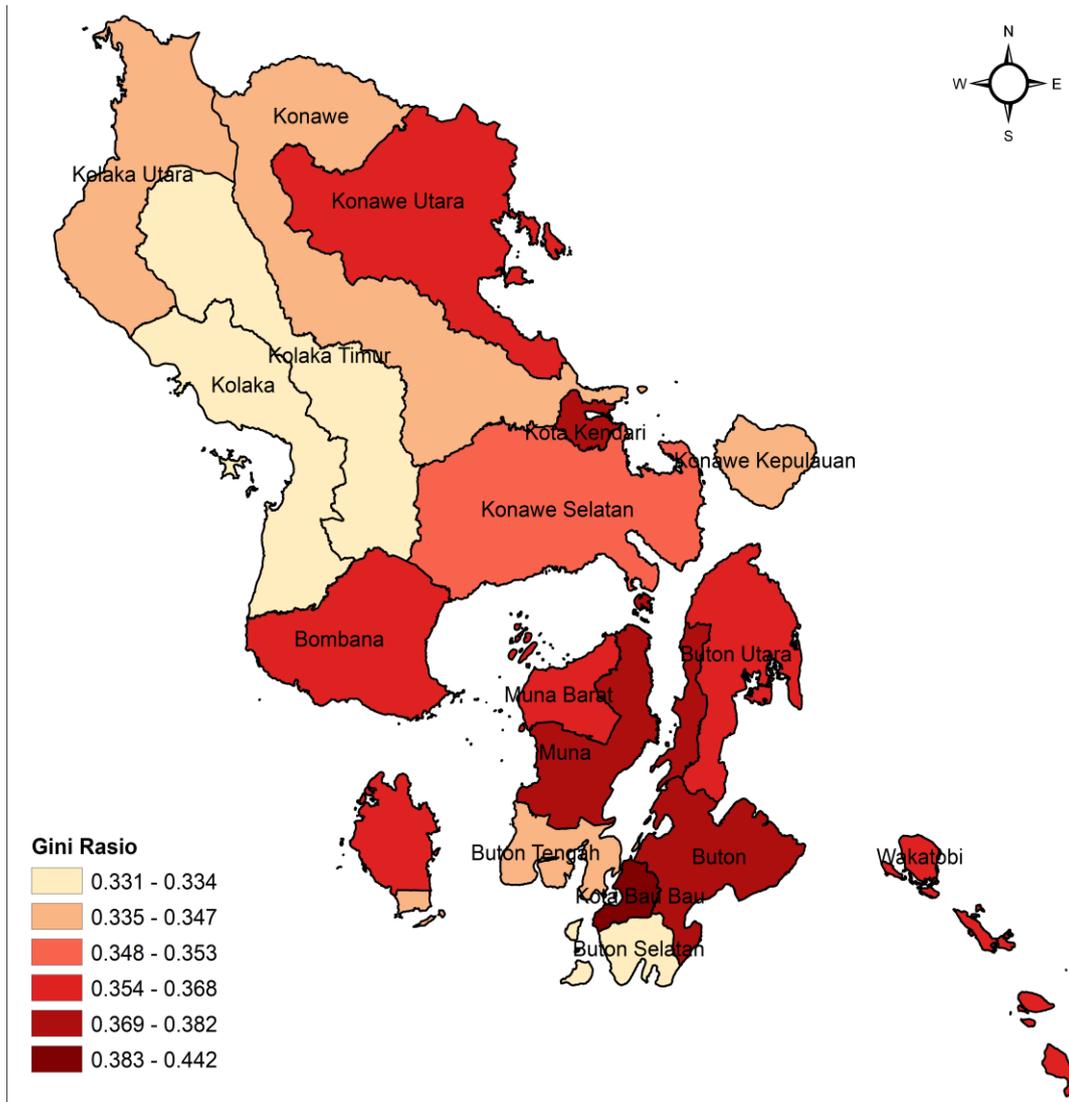
Gambar 1 dan Gambar 2 memperlihatkan pola pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian menuju ke arah sektor industri dan sektor pertanian menuju ke arah sektor jasa selama tahun 2017 sampai 2019. Gambar 1 memperlihatkan pergeseran terbesar terjadi pada wilayah Kabupaten Kolaka dengan nilai ratio pertanian-industri yaitu sebesar 5.03 kemudian diikuti oleh transformasi pertanian-industri Kota Kendari dengan nilai ratio sebesar 2.66, Kabupaten Buton yaitu sebesar 2.49 dan Kota Bau-Bau yaitu sebesar 2.03. Pada Gambar 2, pergeseran sektor pertanian-jasa terlihat bahwa Kota Kendari menjadi wilayah paling besar pergeserannya dengan nilai ratio yaitu sebesar 4.57 dan wilayah Kota Bau-Bau dengan besaran nilai ratio sebesar

3.76. Semakin besar nilai ratio yang dihasilkan pada dasarnya menunjukkan semakin tingginya transformasi yang terjadi. Wilayah berwarna abu-abu pada kedua peta menunjukkan wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak terpilih karena tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi baik ke sektor industri, jasa ataupun keduanya.

Isu ketidaksetaraan pendapatan antar individu telah menjadi perhatian khusus dalam beberapa dekade terakhir. Ketimpangan merupakan masalah mendasar yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah terutama ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat karena memiliki dampak terhadap berbagai aspek masyarakat dan ekonomi. Provinsi Sulawesi Tenggara tidak

terlepas dari persoalan ketimpangan pendapatan, secara agregat nilai ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang

diproyeksikan dari nilai gini ratio selalu berada di atas nasional dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.



Gambar 3. Rata-rata gini ratio Kabupaten/Kota tahun 2017 hingga 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara

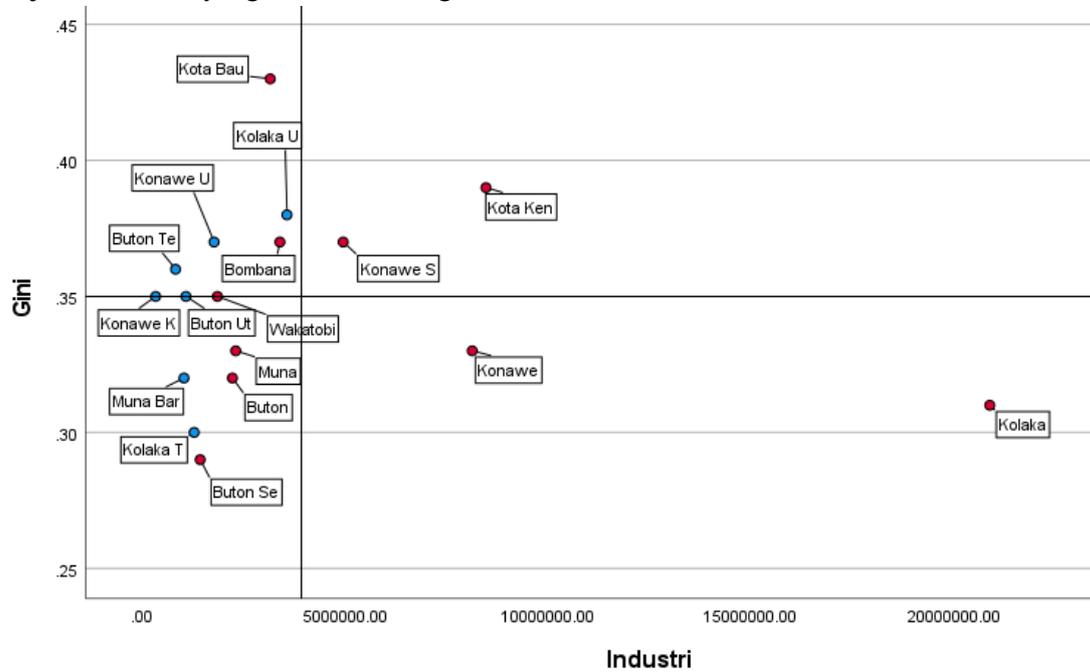
Gambar 3 memperlihatkan tentang gambaran rata-rata nilai gini ratio mulai dari tahun 2017 hingga 2022. Terlihat beberapa wilayah memiliki warna yang cukup pekat yang menandakan semakin besarnya nilai gini ratio wilayah tersebut. Kota Bau-Bau menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rata-rata nilai indeks gini ratio sebesar 0.44, kemudian diikuti oleh Kabupaten Buton dengan nilai indeks gini sebesar 0.38, Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara dan Konawe Utara masing-masing sebesar 0.37. Rata-rata ketimpangan paling rendah pada tahun

2017 hingga 2022 terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kabupaten Buton Selatan dengan nilai indeks gini ratio sebesar 0.33. Walaupun demikian, ke 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk ke dalam ketimpangan sedang berdasarkan klasifikasi ketimpangan pendapatan, yaitu berada di antara nilai 0.3 sampai 0.5.

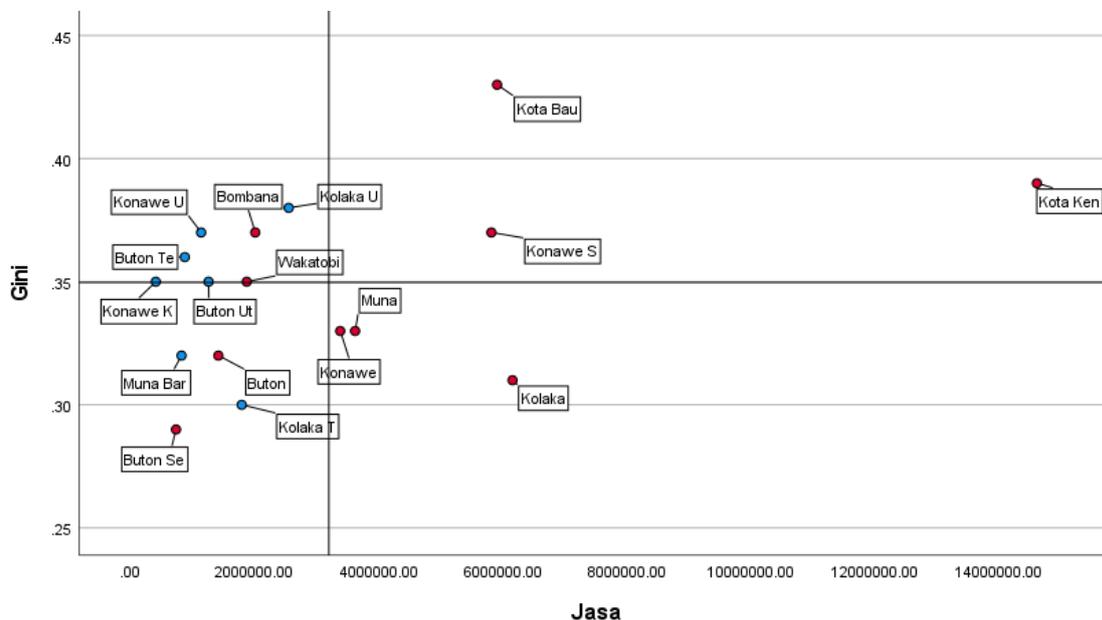
Meskipun isu pendapatan telah menjadi isu krusial di berbagai negara, masih terdapat beberapa perdebatan yang berlanjut mengenai dampak adanya pertumbuhan ekonomi terhadap ketidaksetaraan pendapatan (Alamanda, 2021).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, di antaranya adalah Amri & Nazamuddin (2018) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada pemerataan. Sebaliknya penelitian lain menunjukkan hal yang berbeda, argumen

tersebut menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan masyarakat (Rubin & Segal, 2015; Scully, 2003).



Gambar 4. Tipologi daerah gini dan sektor industri Tahun 2022



Gambar 5. Tipologi daerah gini dan sektor jasa Tahun 2022

Dilihat berdasarkan identifikasi tipologi daerah terhadap dua indikator yaitu gini ratio dan sektor modern (industri dan jasa). Dengan

indikator rata-rata gini menjadi sumbu vertikal dan rata-rata sektor modern (industri dan jasa) menjadi sumbu horizontal, daerah yang diamati

dikelompokkan ke dalam empat kelompok: 1) Daerah gini ratio tinggi dan perkembangan sektor modern tinggi; 2) Daerah gini ratio tinggi dan perkembangan sektor modern rendah; 3) Daerah gini ratio rendah dan perkembangan sektor modern rendah; 4) Daerah gini ratio rendah dan perkembangan sektor modern tinggi. Berdasarkan kriteria ini, maka dapat digambarkan tipologi daerah seperti Gambar 4 dan Gambar 5. Pada sektor industri terlihat pada Gambar 4 bahwa pada Tahun 2022 mayoritas daerah berada di dalam kuadran kedua dengan nilai gini ratio tinggi dan output sektor industri rendah dan kuadran ketiga yaitu gini rendah dan perkembangan sektor modern rendah diantaranya adalah: Kota Bau-Bau, Kolaka Utara, Konawe Utara, Bombana dan Buton tengah berada di kuadran kedua, kemudian Kabupaten Buton, Konawe Kepulauan dan Wakatobi berada di antar kuadran kedua dan ketiga, Kabupaten Muna, Buton, Muna Barat, Kolaka Timur dan Buton Selatan berada pada kuadran ketiga. Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan berada di kuadran pertama sementara untuk kuadran keempat terdapat Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe.

Identifikasi tipologi daerah antara gini ratio dan output sektor jasa pada Gambar 5

memperlihatkan pada tahun 2022 mayoritas daerah berada di kuadran kedua dan ketiga. Untuk kuadran kedua beberapa daerah diantaranya adalah Kabupaten Bombana, Konawe Utara, Kolaka Utara dan Buton Tengah, kemudian untuk kuadran ketiga diantaranya adalah Kabupaten Muna Barat, Buton, Kolaka Timur dan Buton Selatan. Tiga daerah berada di antara kuadran dua dan tiga yaitu, Kabupaten Konawe Kepulauan, Buton Utara dan Wakatobi. Pada kuadran pertama beberapa daerah diantaranya adalah Kota Bau-Bau, Konawe dan Kota Kendari. Kemudian untuk kuadran keempat terdapat Kabupaten Konawe dan Kolaka.

Hasil analisis dengan menggunakan regresi data panel dan beberapa rangkaian pengujian memperoleh model persamaan yang paling tepat adalah *Common Effect Model* berdasarkan hasil pengujian model, pada uji chow F-Statistik  $0.052 > 0.05$  dan uji lagrange multipler dengan perolehan nilai sebesar  $0.210 > 0.05$  sehingga  $H_0$  diterima sebagai model terbaik atau *Common Effect Model* menjadi yang paling tepat.

Tabel 1. Hasil estimasi model analisis transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan *Common Effect Model*

Variabel	Koefisien Parameter		
	Koefisien	Std. error	Prob
_cons	0.343	0.097	0.001
tr_ind	-0.018	0.008	0.026 **
tr_jasa	0.039	0.006	0.000 ***
tr_ind_tt	-0.046	0.014	0.002 ***
Pe	-0.005	0.002	0.048 **
Pe_tt	0.009	0.003	0.005 ***
LnPp	0.068	0.027	0.017 **
LnTk	-0.020	0.007	0.015 **
R-Square	0.49		
Adj R-Square	0.42		
Prob (F-Stat)	0.000		
Number of Observation	60		
LM Test Probability	0.210		

Sumber: Hasil Olahan STATA 17

Ket: Signifikan 1% (\*\*\*), Signifikan 5% (\*\*), Signifikan 10% (\*)

Berdasarkan dari hasil estimasi dengan menggunakan regresi data panel pada

persamaan Tabel 1 memperlihatkan bahwa nilai *probability F-Stat* yang dihasilkan adalah

sebesar  $0.000 < 0.05$ , dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan variabel bebas yang membentuk model di atas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan. *Adj R-Square* pada persamaan di atas adalah sebesar 0.42, artinya bahwa kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan perubahan nilai variabel ketimpangan pendapatan adalah sebesar 42% sisanya 58% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Secara parsial diketahui bahwa nilai *probability t-statistics* yang dihasilkan masing-masing variabel bebas cukup beragam. Untuk variabel *tr\_ind* menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan dengan nilai *probability t-statistics* sebesar  $0.026 < 0.05$ , nilai koefisien yang dihasilkan adalah sebesar -0.018, artinya bahwa ketika terjadi peningkatan pada variabel *tr\_ind* sebesar 1% maka hal ini akan mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar 0.018% dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap tetap. Pada variabel *tr\_jasa* menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai *probability t-statistics* sebesar  $0.000 < 0.05$ , nilai koefisien yang dihasilkan variabel *tr\_ind* adalah sebesar 0.039, artinya bahwa ketika terjadi peningkatan pada variabel *tr\_jasa* sebesar 1% maka hal ini akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.039% dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap tetap. Kemudian untuk variabel *tr\_ind\_tt* (tanpa sektor tambang) juga memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan dengan nilai *probability t-statistics* sebesar  $0.002 < 0.05$ , nilai koefisien yang dihasilkan variabel ini adalah sebesar -0.046, artinya bahwa ketika terjadi peningkatan pada variabel *tr\_ind\_tt* sebesar 1% maka hal ini akan mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar 0.046%. Variabel pertumbuhan ekonomi (*Pe*) dan pertumbuhan ekonomi tanpa tambang (*Pe\_tt*) sama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan yaitu masing-masing nilai *probability t-statistics* sebesar  $0.048 < 0.05$  dan  $0.005 < 0.05$  namun memiliki arah pengaruh yang berbeda. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi nilai koefisien

yang dihasilkan adalah sebesar -0.005, artinya bahwa ketika terjadi peningkatan pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka hal ini akan mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar 0.005%, kemudian untuk variabel pertumbuhan ekonomi tanpa tambang (*Pe\_tt*) nilai koefisien yang dihasilkan adalah sebesar 0.009, artinya bahwa ketika terjadi peningkatan pada variabel pertumbuhan ekonomi tanpa adanya sektor pertambangan sebesar 1% maka hal ini akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.009% dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap tetap.

Peran sektor industri di Sulawesi Tenggara sudah tidak asing lagi dikategorikan sebagai sektor penting. Karena aktivitasnya baik secara agregat Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara telah memperlihatkan besarnya kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian yang dilakukan di sepuluh wilayah Kabupaten/Kota menunjukkan adanya peran transformasi struktur ekonomi ke arah sektor industri baik di variabel industri secara umum maupun transformasi industri tanpa subsektor pertambangan terhadap penurunan nilai ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal demikian terjadi diduga akibat dari transformasi yang terjadi diikuti oleh perpindahan tenaga kerja ke sektor industri dari sektor pertanian, transfer tenaga kerja yang lebih produktif ini, berimplikasi terhadap peningkatan upah yang diterima tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Kemudian industri yang berkembang pada subsektor pertambangan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara adalah pertambangan yang masih belum berteknologi tinggi (minim penggunaan teknologi) sehingga tidak begitu membutuhkan klasifikasi pendidikan yang begitu tinggi, seiring dengan naiknya output sektor industri pertambangan padat karya ini juga menjadi pendorong tingginya arus migrasi tenaga kerja ke arah sektor industri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aljauhar *et al.* (2016) terhadap aktivitas pertambangan di salah satu Kabupaten yang

terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya Kabupaten Bombana memberikan informasi bahwa hadirnya pertambangan telah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya masyarakat yang bekerja di dalam perusahaan pertambangan melalui peningkatan daya serap tenaga kerja masyarakat lokal.

Hal berbeda ditunjukkan dari variabel transformasi sektor pertanian ke arah sektor jasa yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap peningkatan nilai ketimpangan pendapatan. Peneliti menduga hal ini disebabkan karena sektor jasa yang berkembang adalah jasa informal yang tidak begitu produktif dan upah yang rendah. Tenaga kerja sektor pertanian yang minim pendidikan yang tidak terserap pada sektor industri bermigrasi ke sektor jasa informal yang tidak begitu memperhatikan kualifikasi pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlina *et al.* (2022) di Kota Kendari yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan fakta bahwa sistem upah dan besaran upah pada sektor informal adalah upah tetap dengan besaran rata-rata berada pada interval 500 – 1 juta rupiah per bulan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Monika (2022) yang menjelaskan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara transformasi ke arah sektor industri terhadap ketimpangan pendapatan dan hubungan yang positif dan signifikan pada transformasi sektor jasa terhadap peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Barat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Romli *et al.* (2016) yang menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan baik dari sektor industri dan sektor jasa terhadap peningkatan nilai ketimpangan di Pulau Madura.

Efek dari tumbuhnya perekonomian menjadi faktor penting dalam melihat ketidaksetaraan pendapatan, hal ini berkaitan dengan kelas masyarakat mana yang paling diuntungkan dari pertumbuhan tersebut. Jika ternyata pertumbuhan hanya memberikan efek terhadap golongan pendapatan atas, maka

ketimpangan pendapatan jelas akan meningkat. Sebaliknya jika efek dari adanya pertumbuhan lebih besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat rumah tangga miskin, maka akan berdampak besar pada perbaikan tingkat ketimpangan pendapatan (Kakwani & Son, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian terlihat jelas bahwa variabel pertumbuhan ekonomi pada dasarnya telah berhasil memberikan efek pemerataan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, namun jika dilihat berdasarkan hasil variabel pertumbuhan ekonomi tanpa adanya sektor pertambangan memperlihatkan efek yang begitu berbeda yaitu pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan efek terhadap peningkatan ketidaksetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa efek pemerataan yang terlihat pada variabel pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diciptakan dari dorongan pertumbuhan variabel industri pertambangan, tanpa adanya pertumbuhan dari sektor industri pertambangan pertumbuhan yang terjadi bukanlah pertumbuhan yang pro-miskin. Hal ini juga menandakan bahwa kenaikan pertumbuhan yang terjadi pada sektor pertanian dan jasa sangat berpeluang menguntungkan rumah tangga golongan tinggi dari pada rumah tangga berpendapatan rendah. Beberapa hasil studi empiris yang mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di antaranya dilakukan oleh Brueckner *et al.* (2015) menjelaskan bahwa kenaikan GDP pada dasarnya akan menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa peningkatan 1% dalam GDP akan mengurangi nilai koefisien gini sebesar 0.08 poin. Alamanda (2021) yang menemukan korelasi positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di lima puluh negara, kemudian Amri & Nazamuddin (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan arah koefisien negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang, namun berbeda jika dilihat dalam jangka

pendek, hubungan pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transformasi struktural dari sektor pertanian ke arah sektor industri, baik dengan sektor pertambangan maupun tanpa sektor pertambangan, berpengaruh negatif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun, transformasi pertanian ke arah sektor jasa, memperlihatkan hubungan yang positif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penurunan nilai ketimpangan. Namun, pertumbuhan ekonomi tanpa sektor pertambangan berpengaruh positif terhadap peningkatan ketimpangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda. (2021). The Effect of Economic Growth On Income Inequality: Panel Data Analysis From Fifty Countries. *INFO ARTHA*, 5(01), 1–10.
- Aljauhar, I., Arifin, M., & Isfa Sastrawati. (2016). Pengaruh Aktivitas Pertambangan Nikel terhadap Daya Serap Tenaga Kerja dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Pulau Kabaena, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara). *Jurnal Wilayah Dan Kota Maritim*, 4(1), 70–82.
- Amri, K., & Nazamuddin, B. (2018). Is There Causality Relationship Between Economic Growth And Income Inequality?: Panel Data Evidence From Indonesia. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(2), 8–20.
- Andersson, M., & Chaverra, A. P. (2016). Structural Change and Income Inequality – Agricultural Development and Inter-Sectoral Dualism in the Developing World, 1960-2010. *OASIS*, 23, 99–122.
- Ardiansyah, F. (2020). *Transformasi Struktural Ekonomi Terhadap Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia*.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan (Edisi Kelima) (Ke-5)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Brueckner, M., Norris, E. D., & Gradstein, M. (2015). National Income and Its Distribution. *Journal of Economic Growth*, 20(2), 149–175.
- Coudouel, A., Dani, A. A., & Paternostro, S. (2006). *Poverty and Social Impact Analysis of Reform : Lessons and Examples from Implementation*. Washington DC: The World Bank.
- Dartanto, T., Yuan, E. Z. W., & Sofiyandi, Y. (2017). Two Decades of Structural Transformation and Dynamics of Income Equality in Indonesia. *ADB Working Paper Series*.
- Dastidar, A. G. (2012). Income Distribution and Structural Transformation: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries. *Seoul Journal of Economics*, 25(1), 25–56.
- Fei, J. C. H., & Ranis, G. (1964). Development of the Labor Surplus Economy: Theory and Policy. *Publication of the Economic Growth Center, Yale University*.
- Gonzalez, I., & Resosudarmo, B. P. (2018). A sectoral growth-income inequality nexus in Indonesia. *The Regional Science Association International*, 11(1), 123–139.
- Jhingan, M. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Juanda, B. (2009). *Ekonometrika: Pemodelan dan Pendugaan*. Bogor: IPB Press.
- Juanda, B., & Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press Tahun 2012.
- Kakwani, N., & Son, H. H. (2003). Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies. *The Pakistan Development Review*, 42(4), 417–444.
- Kuntoro, E. (2019). *Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Dan Transformasi Struktural Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. Intitut Pertanian Bogor, Bogor.
- Marlina, Harafah, L. O. M., & Rosnawintang. (2022). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Lapangan Kerja Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 7(1), 1–13.
- McMillan, M. S., & Rodrik, D. (2011). Globalization, Structural Change and Productivity Growth. *National Bureau of Economic Research*.

- Mopangga, H. (2010). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Putri, H. S., & Monika, A. K. (2022). Analysis of Structural Change and Its Impact on Income Distribution Inequality in West Java in 2011-2019. *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, 833–842.
- Rodrik, D. (2013, September). Structural Change, Fundamentals, And Growth: An Overview. *Institute for Advanced Study*.
- Romli, M. S., Parulian Hutagaol, M., & Priyarsono, D. S. (2016). *Transformasi Struktural: Faktor-Faktor Dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan Di Madura (Structural transformation: factors and its impact on income disparity in Madura)* (Vol. 5).
- Rubin, A., & Segal, D. (2015). The Effects Of Economic Growth On Income Inequality In The US. *Journal of Macroeconomics*, 45, 258–273.
- Scully, G. W. (2003). Optimal Taxation, Economic Growth and Income Inequality. *Public Choice, Springer*, 115(3–4), 299–312.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Susanto, R. D. (2013). Dampak Perubahan Struktural Sektor Pertanian terhadap Kemiskinan dan Kesempatan Kerja di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 1(19).
- World Bank. (2016). *Poverty and Shared Prosperity, Taking on Inequality*. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.